

PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI PELAKSANA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

**Nur Khasanah^{*1}, Rudy Sukarno², Okta Yustira³, Nur Fitriyani⁴, Tia Intan Pramesti⁵,
Hangka Maolana⁶, Restu Haikal F.⁷
Dosen Pendamping Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.**

^{1,2}Institution/affiliation; addres, telp/fax of institution/affiliation

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: *¹nurhassanah1@gmail.com

ABSTRACT

Pelaksanaan program Keluarga Harapan di berbagai daerah termasuk di Kecamatan Bandongan sering kali tidak sesuai tujuan yang diharapkan. Program PKH hanya menciptakan dependency (ketergantungan) sehingga the circle of poverty (lingkaran kemiskinan) mengakibatkan masyarakat tidak sejahtera. Berdasarkan teori Edward III bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (kecenderungan sikap pelaksana), dan birokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung, mengkaji, dan menganalisis seberapa besar pengaruh sumber daya dan disposisi (kecenderungan sikap pelaksana) terhadap implementasi kebijakan program PKH (Program Keluarga Harapan) di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Metode penelitan yang digunakan berupa penelitian kuantitatif metode survei. Dimana informasi dan data didapat dari responden dengan penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian masalah diungkapkan dengan jalan mengumpulkan data atau informasi, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan data berupa angka dan skor terkait program PKH. Selain memperoleh informasi dan data dari lapangan, penelitian juga mengacu pada literasi pada buku-buku yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sumber daya dan disposisi memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Namun sumber daya hanya menyumbang nilai sebesar 8 % lebih kecil dari disposisi yang menyumbang nilai sebesar 21,7 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya memiliki pengaruh yang lemah dan tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan PKH, sedangkan disposisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan PKH. Sehingga pengaruh kedua variabel berjumlah 22,5 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yaitu komunikasi dan birokrasi.

Keywords : *kebijakan, sumber daya, disposisi, implementasi, kuantitatif*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah dari tahun ke tahun yang sampai saat ini masih terus dilakukan upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling kompleks di Indonesia (Batu, 2015). Selain itu, kemiskinan juga membuat bangsa ini sukar maju dalam bidang ekonomi, pendidikan,

kesehatan, dan teknologi. Suryawati (2005) mengatakan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun ada kemiskinan disekitar kita. Disadari atau tidak, kemiskinan dan kemakmuran seringkali berdampingan di suatu wilayah bahkan di dalam suatu negara yang makmur (kaya) sekalipun. Kemiskinan dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran untuk

konsumsi rumah tangga sehari-hari. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa program guna untuk menanggulangi kemiskinan tersebut atau untuk mengurangi jumlah masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Salah satu program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada sampai saat ini yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Ritonga (2009) dalam Matualage (2015) program-program pengentasan kemiskinan sebelum Program Keluarga Harapan dinyatakan tidak signifikan hasilnya oleh berbagai pihak karena cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin dan karena kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. Program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada, karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, melainkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Peserta penerima bantuan PKH khususnya seorang Ibu dari Rumah Tangga Sangat Miskin yang bersangkutan sebagai penerima PKH tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana PKH bahkan menjalankan komitmen untuk keberhasilan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola PKH. Kegagalan dalam menjalankan PKH ini tentunya bersumber dari peserta PKH yang belum mampu bertanggung jawab penuh dalam menjalankan komitmen atau kewajiban yang sudah ditetapkan, besarnya komitmen para peserta PKH ini tentunya dapat pula berdampak besar pada proses percepatan penanggulangan kemiskinan. Dari fenomena di atas yang diperoleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang evaluasi bantuan Program Keluarga Harapan yang kurang sesuai dengan kinerja atau tujuan yang ditetapkan, dalam sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Pelaksana terhadap Keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandongan”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program PKH” menggunakan penelitian kuantitatif metode survey, yang mana informasi dan data didapat dari responden dengan penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan mengumpulkan data atau informasi, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan data berupa angka dan skor terkait suatu peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung pada masa sekarang. Selain memperoleh informasi dan data dari lapangan, penelitian juga mengacu pada literasi pada buku-buku yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat kembali bahwa kepada teori Implementasi kebijakan publik Edward III. Menurut Edward III (1980) dalam buku Suranto studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi (Suranto, 2014, hal. 38). Edward III (1980) mengungkapkan pendapatnya bahwa terdapat

empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi (sikap kecenderungan) dan (4) Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III, Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Sub variabel kedua yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi yaitu sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mengingat Program Keluarga Harapan adalah program pengentasan kemiskinan di masyarakat maka seharusnya dapat memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan, baik itu berupa sumber daya manusia, *financial*, waktu, maupun sarana yang merupakan sumber daya penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi Program Keluarga Harapan.

Sub variabel ketiga yaitu Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dicermati dalam sub

variabel ini yaitu seberapa jauh tim pelaksana kebijakan berperan aktif menjalankan kebijakan penyaluran ataupun mendistribusikan dana PKH kepada masyarakat penerima. Sub variabel keempat yaitu Birokrasi.

Selanjutnya peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab 1 mengenai **“Pengaruh Sumber Daya Dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”**

Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perhitungan persamaan regresi linear berganda adalah $Y = 8,881 + 0,90X_1 + 0,356X_2$ dengan demikian dari ketiga variabel tersebut, variabel sumber daya dalam korelasi memberikan pengaruh pada tingkat signifikan taraf lemah terhadap variabel implementasi kebijakan. Sebab, jika variabel sumber daya mengalami kenaikan satu persen, korelasi terhadap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 0,90.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2 square) diketahui bahwa 22,5% implementasi kebijakan ditentukan oleh masing-masing variabel sumber daya dan disposisi sikap sedangkan sisanya 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil perhitungan dengan menggunakan $\alpha = 0,05$, diperoleh nilai F

tabel sebesar = 3,23 sedangkan nilai F hitung 5,943. Dapat diketahui bahwa nilai F hitung $>$ nilai F tabel yaitu $5,943 > 3,23$ atau berada pada H_a diterima dan menolak H_o . Maka dapat disimpulkan variabel sumber daya dan kecenderungan sikap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan senilai 22,5%. Sisanya dipengaruhi oleh Variabel Komunikasi dan Birokrasi.

Diperoleh koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,80 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel sumber daya terhadap variabel implementasi kebijakan adalah hanya sebesar 8,00% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sumber daya manusia, financial, waktu, dan sarpras hanya memberikan sumbangan sebesar 8% terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan. Hal ini dikarenakan menurut narasumber, meskipun waktu distribusi dana terlambat maka tidak bermasalah bagi penerima dana PKH. Dalam hal sumber daya financial, narasumber mengatakan bahwa pengambilan dana PKH mereka tidak dipungut biaya sepeserpun atau pihak pemerintah tidak melakukan potongan sama sekali terhadap pencairan dana PKH. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengambilan dana PKH tidak terlalu menjadi problem karena untuk pencairan dana dialkukan oleh pihak penerima. Jadi adanya sarana atau tidak dari pemerintah tidak akan

banyak mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dari output tersebut terlihat bahwa F Hitung = 3,662 dengan tingkat signifikansi/probabilitas $0,62 < 0,05$ maka dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan. Diketahui t hitung = 1,914 dengan nilai signifikansi $0,62 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel sumber daya dengan implementasi kebijakan.

Diperoleh koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,217 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X_2 (Kecenderungan sikap pelaksana) terhadap variabel implementasi kebijakan adalah sebesar 21,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Diketahui F Hitung = 11,653 dengan tingkat signifikansi/probabilitas $0,01 < 0,05$ maka dinyatakan ada pengaruh yang signifikan antara X_2 (Kecenderungan sikap pelaksana) dengan implementasi kebijakan. T hitung = 3,414 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel kecenderungan sikap dengan implementasi kebijakan. Sedangkan kecenderungan sikap pelaksana memiliki pengaruh sebesar 21,7% lebih besar dari sumber daya karena berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa sikap para

pelaksana kebijakan seperti keramahan, sopan santun, simpati, dan daya tanggap sangat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Ketika sikap pelaksana baik maka penerima bantuan akan mudah memahami alur dan tujuan program PKH sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan program. Ketika sikap pelaksana cenderung negatif maka akan mengakibatkan masyarakat penerima bantuan enggan melaksanakan perintahnya sehingga masyarakat tidak mengetahui hakikat tujuan program PKH.

Hasil analisis uji t dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ maka diketahui nilai t tabel sebesar 2,01. Diketahui t hitung variabel sumber daya sebesar 0,632 dan t hitung variabel kecenderungan sikap sebesar 2,765. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai t hitung sumber daya < nilai t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya tidak terdapat pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan t hitung kecenderungan sikap > nilai t tabel, yaitu $2,765 > 2,01$ mengindikasikan bahwa variabel kecenderungan sikap memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sumber daya manusia, finansial, waktu, dan sarpras hanya memberikan

sumbangan sebesar 8% terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan. Sehingga menolak Ha.

2. Sedangkan kecenderungan sikap pelaksana memiliki pengaruh sebesar 21,7% lebih besar dari sumber daya karena berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa sikap para pelaksana kebijakan seperti keramahan, sopan santun, simpati, dan daya tanggap sangat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sehingga menerima H2.
3. Sumber daya dan kecenderungan sikap memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan program PKH sebesar 22,5% dan sisanya 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu komunikasi dan birokrasi. Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.
4. Sumber daya dan kecenderungan sikap mempunyai pengaruh 22,5%. Sumber daya hanya menyumbang 8%, sedangkan kecenderungan sikap menyumbang 21,7%. Jadi totalnya 22,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- [2] Astra, I Gede. "Pluralitas Dan Heterogenitas Dalam Kontek Pembangunan Bangsa", *Jurnal Kajian Budaya* Vol. 10. No. 20, Juli 2014, Hal 3
- [3] Bara, Bayu. 2015. Kenapa Selama Ini Negara Indonesia Selalu Miskin?. Diakses dari www.kompasiana.com Pada Tanggal 15 April 2017 Pukul 06.03 WIB.
- [4] BPS. 2016. "Sensus Penduduk". Diakses di <https://www.bps.go.id>. Pada Tanggal 24 Juni 2017 Pukul 7.57 WIB.
- [5] Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lain*. Jakarta : Kencana.
- [6] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- [7] Indonesia Investment. 2017. "Penduduk Indonesia", 22 Juni 2017, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>. Pada Tanggal 24 Juni 2017 Pukul 07.53 WIB.
- [8] Nugraha, Joko Tri. 2017. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Yogyakarta : Graha Cendekia.
- [9] Sastrosubroto, Ika 2013. *Public Relation Tales: Strategi Public Relations Yang Menginspirasi*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- [10] Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- [11] Suyatno. 2012. "Indikator Kemiskinan". Diakses di www.undip.ac.id/ Pada Tanggal 07 Januari 2012.
- [12] Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- [13] _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [14] Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [15] Suryabrata, S. (2000). *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta : Andi Offset.
- [16] Utomo, Dedy. 2014. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin : Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 02, No.1.